

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan wawancara langsung dengan informan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Kelurahan Gambut adalah salah satu desa di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan tinggi 50,8 meter di atas permukaan laut, lokasi ini terletak antara 2-3° Lintang Selatan dan 114-115° Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki mencapai 19,74 Km² dari wilayah Kecamatan Gambut. Kelurahan Gambut memiliki RT sebanyak 28 buah dengan jumlah penduduk 17.509 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 8.653 sedangkan penduduk perempuan berjumlah 8.856.(BPS Kabupaten Banjar, 2022) Adapun batasan wilayah kelurahan Gambut sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kecamatan Sungai Tabuk
Sebelah Timur	: Kecamatan Liang Anggang/Landasan Ulin
Sebelah Selatan	: Desa Kayu Bawang
Sebelah Barat	: Kelurahan Gambut Barat

b. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi

Potensi daerah tidak dapat dimanfaatkan apabila sarana tidak memadai. Program yang bertujuan untuk meningkatkan daerah tidak akan berhasil. Oleh karena itu, jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia menunjukkan dukungan tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk kelurahan gambut.

Tabel 4.1 Kondisi Pendidikan di Kelurahan Gambut

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
SD/MI	8	1	9
SMP/MTS	3	-	3
SMA/MA/SMK	4	1	5
Perguruan Tinggi	-	1	1

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Sedangkan kondisi ekonomi, sedikit banyaknya mempengaruhi keadaan hidup masyarakat. Mayoritas penduduk di Kelurahan Gambut bermata pencaharian adalah bertani, karena hampir setiap masyarakat desa memiliki lahan sendiri sehingga mereka memanfaatkan hal tersebut dengan bertani kesawah untuk menanam padi, serta pekerjaan lain seperti wiraswasta, buruh bangunan, pekerja serabutan, pedagang, PNS, TNI/Polri dan lain sebagainya. Kondisi perekonomian juga beragam ada yang mampu, kurang mampu, serta menengah keatas. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut:

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Gambut

No	Jenis Pekerjaan	Presentase (%)
1	Petani	35
2	Pedagang	20
3	Wiraswasta	10
4	Buruh Bangunan	11
5	Pekerja Serabutan	8
6	PNS	5
7	TNI/Polri	1
8	Lain-lain	10

Sumber : Kelurahan Gambut 2020

c. Jenis Tanah dan Kondisi Pertanian

Kelurahan Gambut terletak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Sesuai dengan namanya, lahan di kelurahan ini sebagian besar lahan gambut. Warna airnya mirip air teh, lahan rentan terbakar selama musim kemarau, termasuk di dataran rendah, dan salah satu karakteristik tanah gambut adalah pH yang relatif asam atau masam (pH di bawah 7).

Kondisi lahan sawah di Kecamatan Gambut seluas 7.683 Ha dengan total panen 5.610 Ha dan produksi sebanyak 22.111 Ton. Jumlah kelompok tani di Kecamatan Gambut sebanyak 13 kelompok. Kelurahan Gambut memiliki komoditas unggulan, yaitu subsektor tanaman pangan komoditi padi sawah, karena di dukung oleh lahan pertanian yang luas dan 35 persen penduduknya bermata pencaharian

sebagai petani.(BPS Kabupaten Banjar, 2022).

Setiap kelurahan/desa di Kecamatan Gambut memiliki kelompok tani. Total perkumpulan kelompok tani di Kelurahan Gambut sebanyak 13 kelompok yang terdiri atas(BP3K Bpp Gambut, 2023):

Tabel 4.3 Kelompok Tani di Kelurahan Gambut

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1	Tambah Maju	26 orang
2	Al-Falah	16 orang
3	Handil Sampurna	30 orang
4	Berkat Mufakat	30 orang
5	Pamajatan Indah	25 orang
6	Sinar Kupang	31 orang
7	Usaha Tani	25 orang
8	Membangun	30 orang
9	Baiturrahman	22 orang
10	Padi Maurai	47 orang
11	Sumber Rezeki	27 orang
12	Karya Tani	30 orang
13	Maju Makmur	20 orang
Total		359 orang

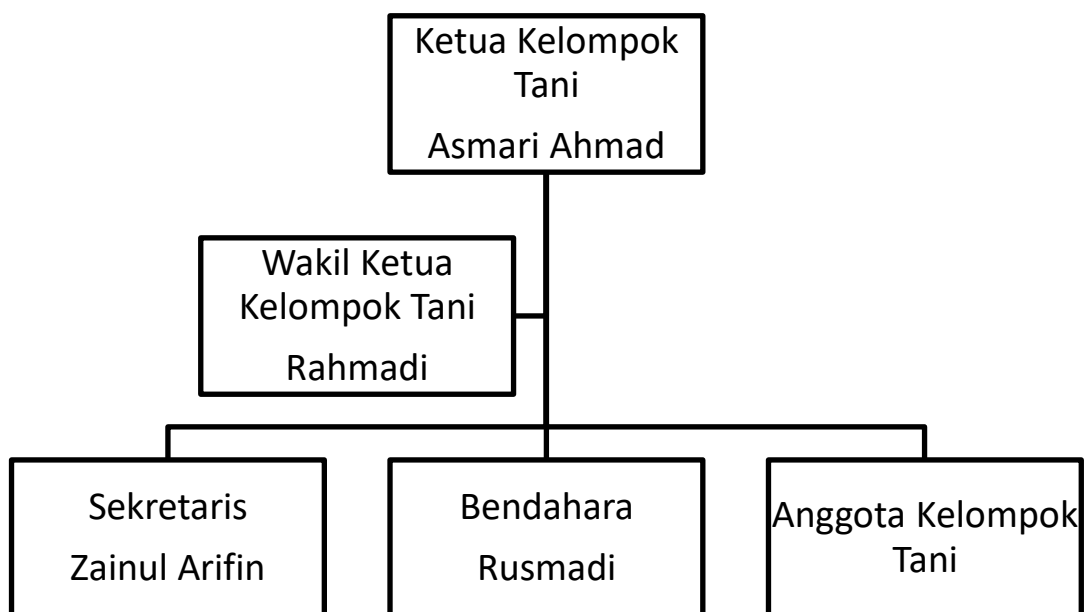
Sumber : BP3K Bpp Gambut 2023

2. Profil Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan sekelompok petani yang bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya pertanian untuk meningkatkan

produktivitas usaha dan kesejahteraan anggota kelompok tersebut. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan lahan pertanian bersama pada satu hampatan atau kawasan. Salah satu kelompok tani di Kelurahan Gambut yaitu Kelompok Tani Padi Maurai yang berada di jalan Pemajatan Km. 2 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dibentuk pada tanggal 23 Juni 2020 oleh pemerintah setempat sebagai tanggapan atas permohonan masyarakat sekitar untuk mempermudah bantuan pemerintah seperti penyuluhan masalah pertanian, subsidi pupuk, dan peralatan pertanian. Dengan harapan dapat meningkatnya pendapatan para petani dan mendorong tingkat kesejahteraan petani.

Nama "*Padi Maurai*" sendiri memiliki makna bagi kelompok tani yang mana hal ini menggambarkan harapan para petani agar hasil pertanian yang di dapat sesuai dengan nama kelompok tani tersebut yang artinya hasil yang melimpah dalam setiap masa panen padi. Komoditas yang diusahakan pada kelompok tani Padi Maurai adalah tanaman padi. Jumlah anggota pada kelompok tani Padi Maurai sebanyak 47 orang yang semuanya aktif dalam kegiatan rutinitas perkumpulan tani. Kelompok tani Padi Maurai terdiri dari 34 petani laki-laki dan 13 petani perempuan. Adapun susunan kepengurusan kelompok tani Padi Maurai sebagai berikut:

Gambar 4.1 Susunan Pengurus Kelompok Tani Padi Maurai**Tabel 4.4 Anggota Kelompok Tani Padi Maurai**

Anggota					
1	Rusdahlina	16	Maisarah	31	M.Salasianor Rajabullar
2	Rudi	17	Syukur	32	Saberan
3	Sariah	18	Tamliha	33	Tukacil
4	Suriansyah	19	Jumiati	34	Zainal Abidin
5	Rabiatul Adawiyah	20	Abdul Sahid	35	Siti Patimah
6	Ismail	21	Inoor	36	Muhammad Ali
7	Ambri	22	Syaipuddin	37	Fauzi
8	Jawiyah	23	Ahmad Hudaini	38	Yurani
9	Baihaki	24	Asliansyah	39	Helmiyah
10	Rahmi Barkiah	25	Misran	40	Saimah
11	Hj. Basnah	26	Nasrul Hadi	41	Wahyuni

12	Rajidi	27	Pahmiajit	42	Ismah
13	Misrani	28	Porkani	43	Rasyid Anshari
14	M.Ramli	29	Sapardi Riady		
15	Syarkani	30	M.Kamaruddin		

Sumber : Kelompok Tani Padi Maurai

3. Uraian Data

Dari 47 anggota kelompok tani hanya 7 orang anggota yang termasuk kriteria informan yang telah ditentukan oleh peneliti.

1. Informan 1

a) Identitas informan

Nama: Asmari Ahmad

Pendidikan Akhir: SLTA/Sederajat

Umur : 51 Tahun

b) Uraian

Bapak Asmari merupakan ketua Kelompok Tani Padi Maurai. Beliau sehari-hari bergelut dibidang pertanian. Sudah bertani selama 19 tahun dengan luas lahan pertanian 2 hektar. Menurut beliau kebijakan subsidi pupuk adalah kebijakan dari pemerintah terkait pengadaan, penyaluran dan penetapan harga pupuk yang terjangkau untuk kebutuhan kelompok tani. Pupuk bersubsidi berhak diterima oleh seluruh kalangan petani padi dengan syarat maksimal lahan pertanian yang dimiliki seluas 2 hektar dan merupakan anggota kelompok tani Padi Maurai. Setiap petani memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah dan jenis pupuk subsidi yang diinginkannya dengan batas

maksimal 7 zak atau 350 kg per hektar. Harga penjualan pupuk subsidi yang ditawarkan kepada anggota kelompok tani tidak sama dengan HET. karena adanya biaya terkait jasa transportasi dan jasa kuli panggul. Sebagai ketua kelompok tani bapak Asmari mengetahui dan memahami cara penyusunan RDKK yang mana dalam prosesnya didampingi oleh petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL). Setelah penyusunan RDKK selesai kemudian data tersebut akan diproses dan tinggal menunggu jadwal kedatangan pupuk subsidi yang akan distribusikan ke kios yang telah ditunjuk sebelum disalurkan kepada semua kelompok petani di Kelurahan Gambut, untuk penyaluran kepada para petani yang ada di kelompok tani akan dilakukan oleh ketua kelompok tani. Pasokan pupuk subsidi yang diterima oleh kelompok tani Padi Maurai sebanyak 8000 kg atau 160 zak. Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani sudah sesuai, karena mengikuti hasil dari penyusunan RDKK yang sebelumnya telah diisi oleh anggota kelompok tani terkait jumlah yang diinginkan. Namun, dalam mendapatkan pupuk bersubsidi kesulitan yang dirasakan ialah pada waktu kedatangan yang tidak pasti membuat anggota kelompok tani selalu mendesak akan waktu kedatangan agar dipercepat.(Wawancara, 20 Oktober 2022)

2. Informan 2

a) Identitas informan

Nama : Porkani

Pendidikan Akhir : SLTA/Sederajat

Umur : 45 Tahun

b) Uraian

Bapak Porkani seorang petani yang memiliki lahan pertanian seluas 1 hektar, dan sudah bertani selama 15 tahun. Bapak Porkani mendefinisikan pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah terkait harga pupuk. Terkait mekanisme mendapatkan pupuk subsidi sudah mengetahui dan memahaminya, menurut beliau dengan adanya kelompok tani mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi lebih terarah. Kebijakan subsidi pupuk yang di dapat secara merata dari kelompok tani membuat biaya untuk membeli pupuk sedikit terbantu karena harga yang murah sehingga biaya tanam padi berkurang. Saat musim tanam biaya yang di perlukan untuk pupuk sebanyak 1.200.000, namun dengan adanya pupuk bersubsidi biaya yang diperlukan hanya 540.000. Ketika masa panen hasil yang didapat sebanyak 12 karung padi atau 6 karung beras. Hambatan yang dirasakan beliau terkait pupuk subsidi ialah masa tunggu distribusi pupuk yang terlalu lama membuat pemupukan di lahan pertanian tertunda. Namun di sisi lain dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani dikarenakan sisa modal dalam pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Harapan beliau untuk pemerintah terkait pupuk bersubsidi, hendaknya dalam segi distribusi kendala yang dialami secepatnya dapat teratasi agar dalam pertanian tidak mengalami

penundaan lagi karena menunggu pupuk bersubsidi. (Wawancara, 21 Oktober 2022)

3. Informan 3

a) Identitas informan

Nama : Tamliha

Pendidikan Akhir : SD/Sederajat

Umur : 47 Tahun

b) Uraian

Bapak Tamliha hanya bekerja sebagai petani, beliau sudah bertani selama 22 tahun sehingga pupuk serta penunjang lainnya sangat dibutuhkan. Lahan pertanian yang dimiliki beliau seluas 1 hektar. Menurut beliau pupuk bersubsidi ialah pupuk yang dijual pemerintah dengan harga yang mudah di jangkau. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi mekanisme yang dilakukan oleh anggota kelompok tani pertama, menyerahkan berkas seperti KTP, Kartu keluarga, dan luas lahan pertanian yang ingin digarap ke ketua kelompok tani. Berikutnya, mengisi jenis dan banyaknya pupuk subsidi yang diinginkan, setelahnya tinggal menunggu datangnya pupuk bersubsidi yang di butuhkan para petani. Adanya pupuk bersubsidi ini sangat membantu dalam pertanian sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk tidak sebanyak saat membeli pupuk non subsidi. Hambatan yang dirasakan oleh beliau adalah keterlambatan dalam kedatangan pupuk bersubsidi sangat mempengaruhi akan waktu tanam. Dalam sekali masa panen

keuntungan yang didapatkan 15 karung padi atau 8 karung beras. Pengeluaran biaya pupuk dalam masa tanam sebanyak 1.800.000, sesudah adanya subsidi pupuk pengeluaran menjadi 810.000. Kesejahteraan petani sedikit meningkat berkat subsidi pupuk dikarenakan biaya untuk modal pertanian berkurang. Harapan beliau berkenaan dengan pupuk bersubsidi ini hendaknya pupuk yang datang tidak mengalami keterlambatan lagi dalam kedatangannya. (Wawancara, 22 Oktober 2022)

4. Informan 4

a) Identitas informan

Nama : Zainal Abidin

Pendidikan Akhir : SLTA/Sederajat

Umur : 50 Tahun

b) Uraian

Bapak Zainal sudah bertani selama 20 tahun. Beliau memiliki lahan pertanian seluas 1 hektar atau 10.000 m². Kebijakan pupuk bersubsidi menurut beliau adalah kebijakan pupuk yang diberikan oleh pemerintah namun dengan stok yang terbatas. Bapak Zainal merasa terbantu dengan adanya pupuk bersubsidi ini karena menekan jumlah pengeluaran dalam modal usaha pertanian, yang biasanya untuk pupuk 1.200.000 lebih besar pengeluarannya namun sekarang modal untuk pupuk berkurang jadi 540.000, di sisi lain subsidi pupuk juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam sekali masa panen beliau

bisa mendapatkan 15 karung padi atau 8 karung beras. Sementara itu, bantuan dari pemerintah terkait pupuk subsidi menurut beliau sering mengalami keterlambatan dalam kedatangannya sehingga mau tidak mau kadang harus membeli pupuk non subsidi di kios milik masyarakat. Harapan beliau hendaknya pupuk bersubsidi dalam distribusinya di percepat sebelum memasuki musim tanam sehingga tidak lagi membuat petani menunggu dalam pengambilan pupuk. (Wawancara, 23 Oktober 2022)

5. Informan 5

a) Identitas informan

Nama : Basariah

Pendidikan Akhir : SLTA/Sederajat

Umur : 55 Tahun

b) Uraian

Salah satu petani yang sudah lama menekuni dunia pertanian adalah Ibu Basariah, beliau bertani mulai tahun 1997 yang artinya sudah bertani kurang lebih 25 tahun. Memiliki lahan pertanian seluas 1 hektar. Menurut beliau kebijakan subsidi pupuk adalah kebijakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan membantu petani dalam menggarap lahan pertanian. Subsidi pupuk sendiri turut membantu dalam hal pengeluaran modal pada pertanian, sebelumnya biaya pupuk untuk bertani 1.200.000 menjadi 540.000 setelah adanya kebijakan tersebut. Mekanisme dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di bantu

oleh ketua kelompok tani sehingga beliau tidak mengalami kesulitan dalam prosesnya. Saat musim panen keuntungan yang didapatkan sebanyak 20 karung padi atau 10 karung beras. Hal tersebut juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani sehingga dapat dengan nyaman mengatur keuangan dalam rumah tangga. Namun masih ada hambatan yang dialami petani seperti distribusi yang terlambat saat petani membutuhkan pupuk untuk pertanian. Keinginan beliau kepada pemerintah ialah mempercepat penanganan distribusi pupuk subsidi kepada petani khususnya wilayah Gambut, agar petani tidak membeli pupuk non subsidi lagi. (Wawancara, 24 Oktober 2022)

6. Informan 6

a) Identitas informan

Nama : Tukacil

Pendidikan Akhir : SLTA/Sederajat

Umur : 73 Tahun

b) Uraian

Tukacil merupakan petani Tertua yang ada di kelompok tani Padi Maurai, beliau telah bertani selama 40 tahun. Lahan yang dimiliki beliau seluas 1 hektar. Pupuk bersubsidi ialah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya dari pemerintah ucap bapak Tukacil dalam memahami kebijakan pupuk subsidi. Dengan adanya kebijakan ini membuat beliau merasa sedikit terbantu, selain itu membuat kesejahteraan petani mengalami sedikit peningkatan terutama

kontribusinya terhadap penekanan jumlah biaya dalam bertani, sebelum adanya pupuk subsidi biaya yang dikeluarkan sebanyak 600.000 setelah adanya pupuk subsidi menjadi 270.000. Dalam masa panen, padi yang dihasilkan sebanyak 6 karung padi atau 3 karung beras. Hambatan yang dirasakan bapak Tukacil dalam memperoleh pupuk subsidi yaitu pada masa tunggu kedatangan pupuk yang tidak pasti sehingga mempersulit dalam proses tanam padi. Bapak Tukacil berharap agar pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait waktu pendistribusian pupuk bersubsidi dan untuk kelompok tani agar selalu memberikan informasi terkait pupuk subsidi. (Wawancara, 25 Oktober 2022)

7. Informan 7

a) Identitas informan

Nama : Yurani

Pendidikan Akhir : SLTP/Sederajat

Umur : 68 Tahun

b) Uraian

Bapak Yurani mempunyai pengalaman bertani selama 30 tahun. Beliau mempunyai lahan pertanian untuk digarap sebanyak 1 hektar. Petani yang bernama Yurani kurang mengetahui terkait mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga memerlukan bantuan ketua kelompok tani dalam prosesnya. Namun beliau mengetahui kebijakan pemerintah tentang pupuk subsidi, menurut beliau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan petani terkait

kebutuhan pupuk dalam pertanian. Dengan adanya pupuk bersubsidi membantu petani dalam biaya produksi padi, hal ini juga mempengaruhi terhadap kesejahteraan petani karena menekan biaya pupuk yang awalnya 1.800.000 menjadi 810.000. Hasil panen yang didapat bapak Yurani yaitu 14 karung padi atau 7 katung beras. Beliau merasa kurangnya informasi dan juga kedatangan pupuk yang selalu terlambat membuat beliau harus membeli pupuk non subsidi yang mana harganya lebih tinggi daripada pupuk bersubsidi. Harapan yang diinginkan beliau terkait kebijakan subsidi pupuk adalah memperbanyak distribusi pupuk kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria untuk membeli pupuk bersubsidi dan jangan ada lagi keterlambatan dalam distribusinya.(Wawancara, 26 Oktober 2022)

Ikhtisar hasil penelitian dalam bentuk matrik adalah penyajian data yang digunakan. Berisikan Identitas informan, gambaran respons, dan faktor yang mempengaruhi respons petani terkait kebijakan subsidi pupuk terhadap kesejahteraan petani di Kelurahan Gambut.

Matrik

Tabel 4.5 Respon Kelompok Tani Padi Maurai di Kelurahan Gambut Terhadap Kebijakan Subsidi Pupuk

Nama Informan	Gambaran Respons	Faktor Respons
Asmari Ahmad	Menerima dan merasa terbantu terhadap kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah	Pupuk subsidi membantu meringankan biaya dalam pertanian

Porkani	Menerima dan merasa terbantu terhadap kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah	Membantu meningkatkan kesejahteraan dikarenakan sisa modal dalam pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok
Tamliha	Menerima dan merasa terbantu terhadap kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah	Membantu dalam pertanian sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk tidak sebanyak saat membeli pupuk non subsidi
Zainal Abidin	Menerima dan merasa terbantu terhadap kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah	Adanya pupuk bersubsidi menekan jumlah pengeluaran dalam modal usaha pertanian
Basariah	Menerima dan merasa terbantu terhadap kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah	Subsidi pupuk membantu dalam hal pengeluaran modal pada pertanian
Tukacil	Menerima dan merasa terbantu terhadap kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah	Kesejahteraan mengalami sedikit peningkatan terutama kontribusinya terhadap penekanan jumlah biaya dalam Bertani
Yurani	Menerima dan merasa terbantu terhadap kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah	Pupuk bersubsidi membantu petani dalam biaya produksi padi

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada kelompok tani Padi Maurai di Kelurahan Gambut, tentang Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Kesejahteraan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam bahwa;

1. Kebijakan subsidi pupuk terhadap kesejahteraan kelompok tani Padi Maurai di Kelurahan Gambut

Sejak 1969, kebijakan pupuk bersubsidi telah menjadi salah satu program pemerintah yang berguna untuk meningkatkan kinerja dalam sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan dalam hal jumlah, jenis, harga, mutu, waktu, dan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan. (Grehenson, 2022) Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis pemupukan berimbang yang disarankan untuk setiap lokasi. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Padi Maurai ialah salah satu kelompok tani yang ada di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kelompok tani ini sudah dikenal dan menerima manfaatnya oleh anggota kelompok tani padi maurai sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kelompok tani ini dibentuk dengan tujuan memudahkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan, pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan

melalui program pemerintah. Pengertian pupuk subsidi menurut informan ke-1 sampai ke-7 setelah dilakukan wawancara, yaitu:

“Kebijakan dari pemerintah terkait pengadaan, penyaluran dan penetapan harga pupuk dengan stok yang terbatas dengan tujuan membantu petani dalam menggarap lahan pertanian”

Sasaran penerima bantuan pupuk subsidi dari pemerintah(Jakaria, 2019)adalah:

- a. Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disahkan oleh kepala desa atau lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) digunakan oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Setiap musim tanam, lahan diusahakan untuk kegiatan pertanian, termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan hortikultura, dan peternakan, dengan luas maksimal 2 hektar

Menurut Bapak Asmari Ahmad setelah dilakukan wawancara terkait siapa saja yang berhak menerima pupuk bersubsidi, Beliau menjawab:

“Pupuk bersubsidi berhak diterima oleh seluruh kalangan petani padi dengan syarat merupakan anggota kelompok tani Padi Maurai dan maksimal lahan pertanian yang dimiliki seluas 2 hektar. Setiap petani memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah dan jenis pupuk subsidi yang diinginkannya dengan batas maksimal 7 zak atau 350 kg per hektar”

Menurut Permentan No 49 Tahun 2020, yang mengatur alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi sektor pertanian pada tahun

anggaran 2021.

“Petani yang dapat menerima pupuk bersubsidi hanya jika mereka memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi petani yang mengusahakan tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai, dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Petani yang bersangkutan harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Ini adalah persyaratan lain yang sangat penting. Petani menghubungi kelompok tani di wilayah masing-masing untuk mengajukan usulan tentang kebutuhan pupuk bersubsidi. Usulan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK)”

Pada kelompok tani Padi Maurai semua anggota kelompok tani memiliki luas lahan pertanian antara 1-2 hektar sesuai dengan kriteria penerima pupuk bersubsidi dari pemerintah. Setiap petani memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah dan jenis pupuk subsidi yang diinginkan dengan batas maksimal 7 zak atau 350 kg per hektar. Menurut Bapak Tamliha selaku anggota kelompok tani bagi mereka yang menginginkan pupuk subsidi dapat mengajukannya kepada ketua kelompok tani dengan cara :

“Pertama, menyerahkan berkas seperti KTP, Kartu keluarga, dan luas lahan pertanian yang ingin digarap ke ketua kelompok tani. Berikutnya, mengisi jenis dan banyaknya pupuk subsidi yang diinginkan, setelahnya tinggal menunggu datangnya pupuk bersubsidi yang di butuhkan para petani”

Kebutuhan pupuk didasarkan pada kebutuhan petani yang disusun secara berkelompok dalam RDKK untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran

2023 :

“Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan untuk pupuk bersubsidi. Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) adalah perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi”(Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, 2022)

RDKK merupakan dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN, oleh karenanya dengan diajukannya RDKK sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk hanya dapat diterima jika ada RDKK. Proses penyusunan RDKK dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Untuk menyiapkan RDKK, pengurus kelompok tani berkumpul, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, didampingi oleh penyuluh pertanian
- b. Ketua kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian, mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok tani untuk membahas, membuat, dan menyetujui daftar kebutuhan sarana produksi yang tepat. Pertemuan ini menetapkan jumlah, jenis, komoditas, dan waktu pupuk yang diperlukan. RDKK harus selesai setidaknya satu bulan sebelum jadwal tanam
- c. Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh Ketua kelompok tani yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian.(Musrizal, 2019)

Demi mendorong kelompok tani untuk menyusun RDKK, perlu dilakukan bimbingan oleh penyuluh, petugas teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD), dan didukung oleh kepala desa atau lurah setempat. Ini perlu

dilakukan karena penyusunan RDKK dilakukan secara bersamaan dan tepat waktu.

Dalam penyusunan RDKK anggota dan pengurus kelompok tani mengadakan musyawarah untuk menyusun daftar kebutuhan pupuk subsidi yang akan dibeli dan digunakan oleh setiap anggota kelompok tani yang prosesnya didampingi oleh petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL).

Tabel 4.6 RDKK Pupuk Subsidi Tahun 2023

No	Nama Petani	Rencana Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)	
			UREA	NPK
1	Asmari Ahmad	2	250	400
2	Rahmadi	2	200	50
3	Zainal Arifin	2	150	50
4	Rusmadi	2	100	50
5	Rusdahlina	2	50	100
6	Rudi	2	150	50
7	Sariah	1	100	100
8	Suriansyah	2	150	50
9	Rabiatul Adawiah	1	50	100
10	Ismail	2	50	100
11	Ambri	2	50	100
12	Jawiyah	1	100	50

13	Baihaki	2	100	50
14	Rahmi Barkiah	2	100	50
15	Hj. Basnah	2	250	100
16	Rajidi	2	50	50
17	Misrani	2	100	100
18	M. Ramli	1	50	100
19	Syarkani	2	50	100
20	Maisarah	2	50	0
21	Syukur	2	50	100
22	Tamliha	1	50	250
23	Jumiati	2	200	50
24	Abdul Sahid	2	50	100
25	Innor	1	50	100
26	Syaipuddin	2	50	100
27	Ahmad Hudaini	1	200	50
28	Asliansyah	2	200	50
29	Misran	2	50	100
30	Nasrul Hadi	2	50	100
31	Pahmiajit	1	50	50
32	Porkani	1	100	100
33	Sapardi Riady	2	50	100
34	M. Kamaruddin	2	50	100

35	M. Salasianor Rajabullah	2	50	50
36	Saberan	2	50	50
37	Tukacil	1	50	50
38	Zainal Abidin	1	100	100
39	Siti Patimah	2	50	0
40	Muhammad Ali	1	50	50
41	Fauzi	2	50	100
42	Yurani	2	100	200
43	Helmiyah	1	50	50
44	Saimah	2	50	50
45	Wahyuni	1	0	50
46	Ismah	1	50	50
47	Rasyid Anshari	1	50	50
Total		78	4050	3950

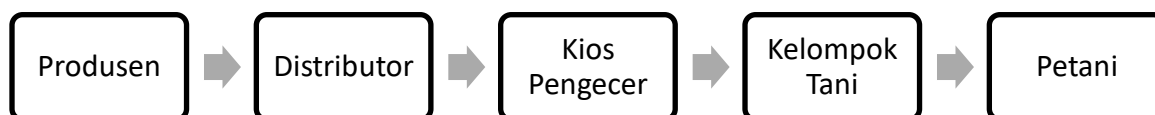
Sumber : Kelompok Tani Padi Maurai 2023

Pupuk yang dibutuhkan kelompok tani Padi Maurai adalah Urea dan NPK sesuai dengan jenis pupuk yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sedangkan jenis komoditas yang akan diusahakan adalah padi lokal seperti siam mayang dan siam rukut, jumlah pupuk yang dibutuhkan kelompok tani sebanyak 8.000 kg/160 zak dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan satu bulan sebelum masa tanam. Setelahnya dilakukan penelitian terkait kelengkapan RDKK sebelum di tandatangani oleh Ketua kelompok tani, Penyuluh dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Penyalur pupuk bersubsidi akan menggunakan RDKK kelompok tani sebagai pesanan kepada penyalur atau pengecer resmi di lini IV. Penyalur pupuk bersubsidi melanjutkan RDKK ke distributor, yang kemudian mengirimkan RDKK ke produsen, yang setelah diverifikasi validitasnya akan mengeluarkan *delivery order* (DO). Setelah itu, stok pupuk dikirim dari gudang distributor ke gudang penyalur yang telah ditunjuk sebelum didistribusikan ke masing-masing kelompok tani yang ada di Kelurahan Gambut.

Pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2 Alur Pendistribusian Pupuk Bersubsidi



Sumber : Penyalur Pupuk Subsidi dari Pemerintah

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dilaksanakan secara tertutup. Pupuk yang di produksi oleh perusahaan dikirim melalui produsen (Lini I dan Lini II) ke distributor di wilayah Kabupaten atau Kota yang dipilih atau ditetapkan oleh produsen (penyalur di Lini III). Dari distributor, pupuk dikirim ke Kios Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai ke kelompok tani, di mana pupuk diserahkan kepada anggota kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK.

Pupuk bersubsidi didistribusikan kepada petani oleh pengecer resmi

yang telah ditunjuk di wilayahnya. Namun pupuk bersubsidi tidak selalu tersedia di kios pengecer, apabila petani membutuhkan pupuk maka petani harus menyediakan uangnya terlebih dahulu setelahnya dari pengecer akan memesan pupuk kepada distributor, ketika pupuk sudah ada maka petani tinggal mengambilnya.

Pendistribuan pupuk bersubsidi pada kelompok tani dikenakan biaya transportasi dan jasa kuli panggul dengan patokan harga Rp 10.000/zak, semua itu di hitung berdasarkan jarak tempuh kendaraan dan jumlah pupuk, sehingga kelompok tani dikenakan total biaya Rp 135.000/zak untuk pupuk Urea dan NPK, karena kelompok tani Padi Maurai hanya menerima biaya bersih dari biaya transportasi atau pendistribusian.

Dalam hal harga, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur oleh HET yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. HET ini berlaku untuk pembelian pupuk oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Penetapan harga pupuk bersubsidi untuk petani berdasarkan kesepakatan bersama. Namun pada Lini IV harga yang di jual tidak sesuai dengan HET, pengecer resmi menjual harga pupuk untuk Urea dan NPK sebesar Rp 125.000 dikarenakan adanya biaya transportasi yang diminta oleh distributor.

Tetapi dengan adanya kebijakan ini banyak memberi keuntungan kepada para petani. Menurut informan ke-2 sampai ke-7 terkait dampak

positif kebijakan subsidi pupuk pada kelompok tani Padi Maurai,

“Kebijakan subsidi pupuk yang di dapat secara merata dari kelompok tani membuat biaya untuk membeli pupuk sedikit terbantu karena harga yang murah sehingga biaya tanam padi berkurang, biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk tidak sebanyak saat membeli pupuk non subsidi, serta membantu menekan jumlah pengeluaran dalam modal usaha pertanian. Selain itu kebijakan pupuk bersubsidi membantu meningkatkan kesejahteraan petani dikarenakan sisa modal membeli pupuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain”

Karena banyaknya manfaat yang diperoleh petani dari pupuk bersubsidi, semua pihak harus serius melakukan tugasnya untuk mendukung kesejahteraan petani. Salah satu efek langsung dari subsidi pupuk ialah peningkatan kemampuan petani untuk pemupukan. Jika sebelumnya penggunaan pupuk dengan dosis yang lebih rendah, sekarang dapat menggunakan dosis yang lebih optimal karena adanya pupuk subsidi. Selain itu, kebijakan ini sangat membantu petani dalam mengurangi biaya pemupukan, yang berarti biaya produksi turun. Oleh karenanya, pemerintah memberlakukan HET pada penjualan pupuk subsidi untuk melindungi petani dari gejolak harga pupuk di pasaran. Dibandingkan dengan penggunaan pupuk non subsidi, biayanya akan jauh berbeda. Berdasarkan wawancara dengan para informan terkait pengeluaran petani dalam menggunakan pupuk nonsubsidi dan pupuk bersubsidi, memiliki perbedaan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7 Perbandingan Jumlah Pengeluaran Petani Untuk Pupuk Non subsidi dan Subsidi

Nama Informan	Jumlah pupuk yang digunakan (Per ZAK)	Pengeluaran dengan harga Pupuk Non subsidi	Pengeluaran dengan harga pupuk subsidi
Asmari Ahmad	13	Rp. 3.900.000	Rp. 1.755.000
Porkani	4	Rp. 1.200.000	Rp. 540.000
Tamliha	6	Rp. 1.800.000	Rp. 810.000
Zainal Abidin	4	Rp. 1.200.000	Rp. 540.000
Basariah	4	Rp. 1.200.000	Rp. 540.000
Tukacil	2	Rp. 600.000	Rp. 270.000
Yurani	6	Rp. 1.800.000	Rp. 810.000

Sumber : Kelompok Tani Padi Maurai 2023

Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pengeluaran petani dengan pupuk non subsidi dua kali lebih besar dibandingkan dengan pupuk bersubsidi, jika untuk pembelian pupuk non subsidi sebesar Rp300.000/zak, berbeda dengan pembelian pupuk subsidi hanya sebesar Rp135.000/zak. Selisih harga yang dimiliki sebesar Rp165.000. Dengan demikian, hal ini dapat mempengaruhi modal yang dikeluarkan oleh petani ketika masa tanam.

Pendapatan yang diperoleh petani dari hasil pertanian, yang secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan hidup, dapat digunakan untuk mengukur indikator tingkat kesejahteraan petani. Apabila pendapatan petani dari hasil pertanian mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka minimal kesejahteraan dalam aspek ekonomi terpenuhi. Semakin banyak

padi yang dihasilkan petani, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh petani, sehingga tingkat kesejahteraan petani ikut naik. Di Kelurahan Gambut harga jual beras lokal sebesar Rp12.000,00/liter atau Rp600.000,00/zak. Maka dapat kita hitung pendapatan petani dalam sekali masa panen yaitu:

$$\text{Pendapatan Petani} = \text{Total Pendapatan} - \text{Modal Awal}$$

Dari penelitian menunjukkan bahwa total produksi padi yang dihasilkan petani pada kelompok tani Padi Maurai dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.8 Perbandingan Pendapatan Petani Untuk Pupuk Nonsubsidi dan Bersubsidi

Nama informan	Hasil Panen	Pendapatan dengan pupuk bersubsidi	Pendapatan dengan pupuk nonsubsidi
Asmari Ahmad	10 zak	Rp. 4.245.000	Rp. 2.100.000
Porkani	10 zak	Rp. 3.060.000	Rp. 2.400.000
Tamliha	8 zak	Rp. 3.990.000	Rp. 3.000.000
Zainal Abidin	6 zak	Rp. 4.260.000	Rp. 3.600.000
Basariah	3 zak	Rp. 5.460.000	Rp. 4.800.000
Tukacil	8 zak	Rp. 1.530.000	Rp. 1.200.000
Yurani	7 zak	Rp. 3.390.000	Rp. 2.400.000

Sumber : Kelompok Tani Padi Maurai 2023

Hasil tabel menunjukkan pendapatan dengan menggunakan pupuk bersubsidi memberikan keuntungan yang lebih besar daripada pendapatan

dengan menggunakan pupuk non subsidi. Petani dapat mengoptimalkan hasil panen mereka sehingga dapat menghasilkan yang terbaik, memiliki nilai jual yang tinggi, dan mendapat keuntungan yang besar dari hasil panen tersebut untuk mencukupi kebutuhan. Dengan demikian, kesejahteraan petani pasti akan meningkat karena kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.

Kesejahteraan petani terdiri dari terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga. Ini termasuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakaian, rumah yang layak, kesehatan, dan pendidikan. Adanya kebijakan pupuk bersubsidi dari pemerintah membantu sekali kepada kelompok tani Padi Maurai yang ada di Kelurahan Gambut sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai.

2. Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan sosial selalu dikaitkan dengan kesejahteraan ekonomi Islam. Hubungan dengan Allah dan sesama manusia harus digabungkan (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian juga, dorongan untuk beriman selalu diikuti dengan dorongan untuk melakukan amal saleh, yang mencakup menciptakan kesejahteraan sosial.

Manusia diciptakan untuk hidup bermasyarakat, meskipun mereka memiliki berbagai selera dan tabiat individu. Ini karena setiap individu sangat bergantung pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keberadaannya dalam kelompok. Selain itu, manusia juga membutuhkan lembaga atau

institusi yang melindungi, mengatur dan memfasilitasi berbagai aturan untuk memudahkan mereka memenuhi kebutuhannya. Lembaga ini disebut "pemerintahan".(Sodiq, 2015)

Kesejahteraan menunjukkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakatnya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan hendaknya dapat memberikan kemudahan terkait segala jenis kebijakan yang dibuat termasuk kebijakan subsidi pupuk.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada kelompok tani Padi Maurai di Kelurahan Gambut, kebijakan ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga mempengaruhi akan kesejahteraan petani. Adanya keterlambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET menimbulkan kerugian terhadap para petani. Dalam kenyataannya, bahkan ketika transaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat kerelaan di antara keduanya, transaksi tersebut diperbolehkan. Namun, Islam menganjurkan agar para pedagang tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Hadits berikut berkaitan dengan keuntungan:

“Demikian pula seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum amalan-amalan wajibnya, demikian pula seorang pedagang tidak akan mendapatkan keuntungan sebelum modal pokoknya”

(HR Bukhari dan Muslim)

Jika kenaikan harga tidak melebihi tingkat normal, maka dapat dikatakan bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan oleh *supply* dan

demand. Menurut analisis ekonomi Islam, penetapan harga untuk jual beli pupuk bersubsidi tidak boleh dilakukan karena pemerintah sudah menyesuaikan harga secara normal, dan jika tidak ada intervensi pemerintah langsung, maka kemungkinan besar pelonjakan harga akan terjadi tanpa intervensi pemerintah.

Dalam hal keadilan terhadap pengecer, pemerintah sudah memberikan sebagian keuntungan dari jual beli dengan distributor. Inilah fungsi negara sebagai regulator; mengawasi dan mengatur mekanisme harga pasar agar seimbang, sehingga terciptanya harga yang adil (*equilibrium price*). *Equilibrium price* adalah harga yang tidak mempengaruhi baik dari penjual maupun pembeli.

Dalam ekonomi Islam, setiap kebijakan yang ada harus memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan, baik material maupun spiritual. Kepemilikan harta, yang mencakup kepemilikan individu, umum, dan negara, harus dikelola dengan cara yang mencakup penggunaan dan pengembangan harta. Ini adalah konsep ekonomi Islam yang dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pokok (primer) dipenuhi untuk semua orang di masyarakat secara keseluruhan, serta memastikan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. (Sholahuddin, 2009)

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Terpenuhinya kebutuhan adalah komponen utama dari kesejahteraan. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena tujuan terakhir manusia adalah membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan taqwa.

3. Kendala Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Kelompok Tani Padi Maurai di Kelurahan Gambut

Ketersediaan sarana produksi berupa pupuk diperlukan untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian. Pemerintah menawarkan kemudahan dengan memfasilitasi subsidi pupuk untuk jaminan kepada petani atau kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, pemerintah menetapkan komoditas pupuk bersubsidi sebagai barang yang diawasi dan melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi dengan pola tertutup melalui RDKK.

Kebijakan subsidi pupuk memiliki banyak keunggulan, tetapi banyak masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Hal ini berdampak pada seberapa efektif target pemerintah untuk menyediakan pupuk bersubsidi. Pada dasarnya, tujuan kebijakan subsidi pupuk adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara konsisten melalui usaha tani mereka, tetapi tujuan pemerintah masih belum tercapai. Penelitian ini menemukan beberapa kendala, di antaranya:

a. Ketidaktepatan waktu ketersediaan pupuk bagi petani

Karena petani membutuhkan pupuk pada periode tertentu selama masa tanam, pupuk harus tersedia setiap saat, terutama selama masa pemupukan. Pendistribusian saat ini belum berpihak kepada petani, dan banyak kendala terutama keterlambatan pengiriman pupuk bersubsidi, sehingga menyebabkan kelangkaan yang berdampak pada pola musim tanam dan kualitas padi.

Seperti yang disampaikan ketua kelompok tani Padi Maurai saat diwawancarai,

"Dalam mendapatkan pupuk bersubsidi kesulitan yang dirasakan ialah pada waktu kedatangan yang tidak pasti membuat anggota kelompok tani selalu mendesak akan waktu kedatangan agar dipercepat."

Selain itu, waktu tunggu distribusi pupuk yang terlalu lama membuat pemupukan di lahan pertanian tertunda. Dengan demikian, waktu tanam padi akan tertunda, yang akan berdampak pada kegiatan pertanian lainnya.

Akan tetapi bagi anggota kelompok tani yang tidak sabaran akan memilih membeli pupuk non subsidi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Zainal :

"Bantuan dari pemerintah terkait pupuk subsidi sering mengalami keterlambatan dalam kedatangannya sehingga mau tidak mau kadang harus membeli pupuk non subsidi di kios milik masyarakat."

Bapak Yurani juga menyatakan bahwa :

"kurangnya informasi dan juga kedatangan pupuk yang selalu terlambat menyebabkan harus membeli pupuk non subsidi yang mana harganya lebih tinggi daripada pupuk bersubsidi."

Pupuk non subsidi sering mengalami lonjakan di pasar. Hal tersebut dapat dimaklumi karena pupuk non subsidi adalah barang bebas yang tanpa pengawasan, tidak seperti pupuk bersubsidi. Kios dapat menentukan sendiri harga jual pupuk non subsidi. Pada saat pupuk bersubsidi mengalami keterlambatan atau kelangkaan, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya dapat melonjak sewaktu-waktu jika sudah memasuki waktu pemupukan. Akibatnya, petani terpaksa membeli karena tidak ada pilihan lain sehingga petani berpotensi mendapatkan rugi yang cukup besar apabila tidak diimbangi oleh kenaikan harga beras.

Sebagai indikator keberhasilan dari pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi adalah tercapainya prinsip 6 tepat penyaluran pupuk bersubsidi. Berkaitan dengan upaya untuk mencapai enam tepat penyaluran pupuk bersubsidi pada kelompok Tani Padi Maurai, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tepat Mutu

Kondisi di mana pupuk bersubsidi yang didistribusikan sesuai standar yang telah ditentukan. Produsen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kualitas pupuk bersubsidi telah sesuai dengan persyaratan. Jika terjadi ketidaksesuaian di lapangan, hal itu disebabkan oleh perlakuan dan aplikasi pupuk yang kurang benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pupuk bersubsidi yang tersedia sesuai standar.

2) Tepat Tempat

Tepat tempat dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pupuk bersubsidi mudah didapatkan di sekitar lokasi kegiatan usaha petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak penyalur pupuk bersubsidi di Kelurahan Gambut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk masyarakat petani di Kelurahan Gambut mudah mendapatkan pupuk bersubsidi.

3) Tepat Harga

Harga pupuk merupakan satu hal yang memiliki variabel penting dalam pertanian. Suatu kondisi dimana petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios penyalur pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga tebus petani secara kontan di tingkat penyalur tidak sesuai dengan HET karena adanya biaya yang dikenakan distributor. Selain itu,

kelompok tani Padi Maurai menebus pupuk melalui penyalur di Kelurahan Gambut juga harus menanggung biaya angkut sebesar 10.000 ke lokasi usaha taninya.

4) Tepat Jumlah

Suatu kondisi di mana petani dapat memenuhi kebutuhan pupuk mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan kelompok petani Padi Maurai yaitu 8.000 ton atau 160 zak.

5) Tepat Waktu

Suatu kondisi dimana pupuk bersubsidi secara fisik tersedia pada saat dibutuhkan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen telah menyediakan stok dalam jumlah cukup. Walaupun pupuk bersubsidi tidak tersedia pada saat dibutuhkan petani, itu bukan karena stok pupuk yang kurang tetapi karena adanya keterlambatan administrasi. Hal ini disimpulkan karena pengambilan pupuk kepada Lini IV sesuai dengan waktu kebutuhan petani pada musim tanam. Petani yang memiliki musim tanam satu kali dalam setahun sudah memesan pupuk tersebut kepada Lini IV untuk diberikan pada musim tanam tersebut kepada petani. Salah satu kendala yang diungkapkan adalah keterlambatan dalam pengadaan pupuk bersubsidi baik di kios itu sendiri maupun ketika kios mengambil ke distributor.

6) Tepat Jenis

Suatu kondisi dimana jenis-jenis pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani yaitu Urea dan NPK tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai alokasi yang telah ditentukan.

Mencermati hasil kajian diatas menunjukkan bahwa indikator tepat yang menjadi target penyaluran pupuk bersubsidi masih belum sepenuhnya tercapai. Indikator-indikator yang sudah tercapai adalah tepat mutu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat jumlah. Sedangkan indikator tepat yang belum terpenuhi adalah tepat harga dan tepat waktu.

Pemerintah harus memperbaiki sistem penyaluran dan pengawasan dari permasalahan yang timbul akibat kebijakan pupuk bersubsidi untuk menjadi lebih efisien dan efektif mengingat masalah yang muncul saat menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir. Sebagai konsekuensi, pihak pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan dan desa/kelompok tani perlu mempersiapkan kelembagaan dan infrastruktur distribusi pupuk bersubsidi melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu melaksanakan penyaluran

pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani. Disamping itu, Pemerintah Daerah (Provinsi/kab/kota) melalui Dinas Pertanian dapat lebih berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya.(Peraturan Menteri Perdagangan, 2009)

- b. harga pupuk subsidi yang dijual oleh kios pengecer tidak sesuai dengan harga patokan eceran tertinggi pemerintah

Pada tingkat pengecer, ada kenyataan bahwa pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Pengecer mengklaim bahwa kenaikan harga pupuk bersubsidi adalah akibat dari kenaikan harga sebagai ganti ongkos buruh dan biaya transportasi distributor, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kios pengecer resmi tidak melaksanakan ketentuan pemerintah tentang HET juga. Namun, karena masyarakat membutuhkannya, kenaikan harga menjadi suatu yang dianggap wajar.

selisih antara harga yang ditetapkan pemerintah dan harga aktual kios pengecer di Kelurahan Gambut :

Tabel 4.9 Harga pupuk di Kelurahan Gambut

Jenis Pupuk	Harga Pupuk Subsidi Per ZAK		Selisih Harga
	HET	Kios Pengecer	
Urea	Rp. 112.500	Rp. 125.000	Rp. 12.500
NPK Phonska	Rp. 115.000	Rp. 125.000	Rp. 10.000

Sumber : Kelompok Tani Padi Maurai 2023

Ada perbedaan harga pupuk bersubsidi antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kios pengecer (Lini IV), untuk pupuk Urea dijual

dengan harga Rp 125.000/zak artinya terdapat selisih harga yang lebih mahal sebesar Rp 12.500 dan untuk pupuk NPK harga yang dijual sebesar Rp 125.000/zak yang artinya memiliki selisih harga sebesar Rp 10.000. Harga tersebut belum termasuk biaya transportasi dan jasa kuli panggul ke kelompok tani sehingga anggota kelompok tani Padi Maurai mengeluarkan biaya bersih sebesar Rp 135.000/zak.

Dalam soal harga, petani sebagai konsumen tidak memiliki daya dalam menyesuaikan harga pupuk tersebut, sehingga aktifitas pertanian petani yang menyesuaikan dengan harga pupuk yang beredar saat ini. Otomatis pendapatan petani untuk mencapai keuntungan yang efektif mereka membuat anggaran pembiayaan pertanian mereka sendiri. Dan disini ditemukan ketergantungan petani pada pupuk terutama pada harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tersebut. Dalam penelitian ditemukan juga ketidaksesuaian harga yang dilakukan oleh Lini IV dikarenakan penambahan biaya sebagai harga tambahan sistem distribusi dari distributor ke kios pengecer.

Secara umum, evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, selanjutnya bagaimana mengurangi kesenjangan tersebut. Fokus utama evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk lebih diarahkan kepada hasil, manfaat dan dampak dari program tersebut. Pemerintah harus dapat berperan aktif dalam proses pengawasan, tidak hanya sekedar mengetahui namun perlu tindakan proaktif dalam pengadaan pupuk subsidi sehingga distribusi pupuk

yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan panen petani dapat berjalan dengan lancar.